

PENEGAKAN PERATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Oleh:

Saiful Anwar¹ dan Aminoto²

ABSTRACT

This research aims to portray the implementation of regulatory enforcement on criminal acts committed by civil servants and the obstacles that impede its enforcement. In parallel, this research aims to provide solutions to the problems of law enforcement on criminal offense committed by a civil servant in the Special Capital Province of Jakarta as part of good governance implementation.

This research is a normative legal research, using secondary data that obtained through a literature study subsequently supplemented by interviews with sources informant. As for data analysis, carried out qualitatively and presented descriptively.

The result of the research reveals that the enforcement of law on criminal acts committed by civil servants in the Special Capital Province of Jakarta has not functioned as expected. Several emerging problems are caused by the provision of law itself. In particular, Government Regulations (*Peraturan Pemerintah*) that are not clearly and specifically set the action to be taken against crime carried out by civil servants as a mean to avoid different interpretations. In addition, there is no regulation governing the effort to acquire arrest warrant and court decision which have permanent legal status, whereas both arrest warrant and court decision are the basis for an action to be taken against crime carried out by civil servants. Other obstacle that impedes regulatory enforcement on criminal acts committed by civil servants is the lack of good will from the Government of Jakarta Special Capital Province to enforce the law. This is indicated by the number of criminal cases committed by civil servants in the Special Capital Province of Jakarta but their administrative settlements are incomplete. Based on the above mentioned condition, it is very crucial to alter current civil service regulations, particularly the articles that govern criminal acts committed by civil servants. Furthermore, the Special Capital Province of Jakarta must set law enforcement on civil servants as one of the central agendas within the on going bureaucratic reform process. So that it could create a legal certainty and an equality on taking decision to make a good Governance in the Special Province of Jakarta.

Keywords: Criminal Offenses, Civil Servants, Good Governance, Special Capital Province of Jakarta.

¹ Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum UGM.

² Fakultas Hukum UGM.

I. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan indikasi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Salah satu prasyarat dalam proses itu adalah adanya sumber daya manusia yang jujur dan profesional. Dalam rangka hal tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).³

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Agus Sutiono dan Ambar TS, maka pemerintah pada tahun 1998 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menetapkan terwujudnya pemerintahan yang baik. GBHN menegaskan bahwa semua bidang atau aspek yang menyangkut tata pemerintahan, termasuk didalamnya pengaturan dan pelaksanaan sistem kompensasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.⁴ Hal ini tentunya didasari pada kesadaran pemerintah akan pentingnya peranan PNS sebagai mobilisator dan dinamisator birokrasi Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga untuk dapat mencapainya harus pula diimbangi dengan sistem remunerasi atau kompensasi yang layak.

Demikian halnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta diperlukan berbagai dukungan, salah satunya adalah sumber daya manusia yang jujur dan profesional yang tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena PNS sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan

³ Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

⁴ Ambar Teguh Sulistiyani (editor), 2004, *Memahami Good Governance dalam Prespektif Sumber Daya Manusia (Kumpulan Artikel)*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 25.

nasional,⁵ sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada kenyataannya, masih banyak persoalan terkait dengan sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap terwujudnya Pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh PNS dengan bermacam jenis tindak pidana yang terjadi. Perbuatan tersebut jelas akan berdampak tidak hanya terhadap diri PNS itu sendiri dan keluarganya, akan tetapi sebagai PNS yang memiliki kedudukan khusus sebagai aparatur negara tentunya akan menimbulkan banyak akibat dari perbuatan tersebut. Melalui kedudukannya tersebut, maka upaya penindakan yang dilakukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana pun tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berwajib saja, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi ada tindakan lain yang dilakukan oleh institusi tempat yang bersangkutan bertugas sebagai PNS. Seorang PNS yang terbukti melakukan tindak pidana maka sanksi atau hukuman yang diterima tidak hanya sanksi pidana tapi juga sanksi administrasi. Inilah salah satu yang membedakan antara tindak pidana dengan tindakan pelanggaran disiplin biasa yang dilakukan oleh seorang PNS. Begitu pula yang membedakan antara yang melakukan tindak pidana itu masyarakat umum atau PNS.

Upaya penindakan dalam rangka penegakan peraturan secara administrasi terhadap terjadinya tindak pidana oleh PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat. Berawal dari adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana oleh seorang PNS sehingga harus dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib. Sejak dilakukannya penahanan tersebut, yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sejak saat itu dapat dilakukan tindakan sesuai peraturan

⁵ Sri Hartini dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

yang berlaku sampai akhirnya yang bersangkutan selesai menjalani proses persidangan dan dinyatakan terbukti atau tidak terbukti dalam pengadilan.

Dalam konteks inilah kemudian terjadi permasalahan terkait upaya penegakan peraturan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana. Pertama, sulitnya mendapatkan surat penahanan dari pihak yang berwajib sampai dengan surat putusan baik tingkat pertama maupun terakhir dari pengadilan yang menyidangkan PNS tersebut. Kedua, adanya interpretasi yang berbeda terhadap waktu dilakukannya pemberhentian sementara terhadap PNS yang diduga melakukan tindak pidana (apakah sejak dilakukan penahanan atau sejak yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan). Ketiga, berapa gaji yang diberikan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri (50 % atau 75 % dari gaji pokok) dan, keempat, peraturan mana yang harus digunakan sebagai dasar dilakukannya tindakan terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana. Apakah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atau Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar sehingga PNS yang bersangkutan harus diberhentikan atau tidak diberhentikan. Hingga akhirnya kapan dilakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dapat dilakukan. dalam hal ini terhadap PNS yang tidak diberhentikan, sementara yang bersangkutan masih harus menjalani vonis hukuman penjara. Selanjutnya kalau karena tindak pidana yang dilakukan kemudian yang bersangkutan harus diberhentikan, apakah layak tanpa melihat sebab terjadinya tindak pidana serta memperhatikan jasa, pengabdian dan keluarganya yang akan ikut menanggung akibatnya. Sampai saat ini ada puluhan PNS di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat tindak pidana namun belum mendapatkan kepastian hukum terhadap sanksi administrasi yang harus mereka terima. Beragam kondisi, ada yang dalam proses penyidikan, ada yang dalam proses persidangan, ada yang sedang menjalani vonis putusan, bahkan tidak

sedikit yang sudah selesai menjalani putusan dan sudah dibebaskan dari tahanan. Persoalan lain ada juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melaporkan tentang adanya PNS yang berada dilingkungannya yang telah melakukan tindak pidana dan tidak terdeteksi oleh Badan Kepegawaian Daerah hingga akhirnya tidak terproses sebagaimana mestinya.

Berdasarkan persoalan-persoalan itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, sebab meskipun persoalan ini sudah lama terjadi dengan aturan yang juga sudah cukup lama, namun menurut hemat penulis persoalan ini masih belum terselesaikan hingga hari ini, dan masih terus terjadi di lembaga-lembaga pemerintah khususnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentu berakibat pada tidak berjalannya proses penegakan peraturan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut diatas, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta?
2. Kendala apa yang menghambat pelaksanaan penegakan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk menegakan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PNS sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta?

III. Metode Penelitian

Penelitian mengenai penegakan peraturan mengenai tindak pidana PNS sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan penelitian hukum normatif. Adapun dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup

bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁶ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian hasil penelitian tersebut dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan bersifat deskriptif analitis karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, doktrin, peraturan perundangundangan, dan dikatakan analitis karena data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan.

Berdasarkan bahan hukum yang sudah ada, untuk menunjang data sekunder dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penegakan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Mengenai Tindak Pidana PNS di Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan penanganan PNS yang melakukan tindak pidana diawali dari adanya informasi PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang PNS karena diduga telah melakukan tindak pidana sehingga harus dilakukan penahanan untuk memudahkan jalannya penyidikan maupun proses persidangan di Pengadilan. Maka berdasarkan surat penahan dari pihak yang berwajib kemudian pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana PNS tersebut

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

bertugas melaporkan perihal penahanan tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan dilampirkan surat penahanan dari pihak yang berwajib.

Berdasarkan laporan dan surat penahanan tersebut, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri. Kewenangan Gubernur ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Setelah dilakukan pemberhentian sementara, maka PNS yang bersangkutan mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, apabila belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya.

Sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pimpinan kepala SKPD melaporkan kembali kepada pejabat Pembina kepegawaian. Terhadap putusan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan karenanya dibebaskan dari segala tuntutan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merehabilitasi semua yang telah dikenakan kepada PNS yang bersangkutan.

Adapun terhadap putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, oleh karenanya dikenakan hukuman penjara sesuai dengan kesalahannya, maka perlu dilihat terlebih dahulu, apakah perbuatan yang terbukti dilakukannya tersebut adalah tindak pidana kejahatan umum atau tindak pidana kejahatan jabatan.

1. Tindak pidana kejahatan umum

Terhadap tindak pidana kejahatan umum, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. Pada ayat (4) dikatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan umum namun ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun maka sanksinya adalah dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, dalam hal ini apabila tidak diberhentikan maka PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin jenis hukuman berat yang lain selain pemberhentian, misalnya penurunan pangkat. Sedangkan apabila ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih maka sanksi hukumannya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini keduanya adalah sanksi pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil.

2. Tindak pidana kejahatan jabatan

Terhadap tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian PNS dikatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan data yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 54 (lima puluh empat) orang PNS yang terlibat melakukan tindak pidana dengan perincian 19 (sembilan belas) orang PNS melakukan tindak pidana kejahatan umum dan 35 (tiga puluh lima) orang PNS melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah PNS secara keseluruhan hanya sebesar 0,064 % (nol koma nol enam empat persen) yaitu 54 (lima puluh empat) orang PNS dari 83.376 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang PNS. Jumlah eselon yang ada adalah 6.785 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jabatan dan dari jumlah tersebut, terdapat 35 (tiga puluh lima) orang PNS atau 0,51 % yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini merupakan persentasi yang sangat kecil. Namun demikian, kalau dilihat dari pelaksanaannya, dari 54 (lima puluh empat) orang PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib, hanya 30 orang atau 55 % (lima puluh lima persen) yang dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri, dan seluruhnya diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sedangkan 24 (dua puluh empat) orang atau 45 % (empat puluh lima perseratus) tidak atau belum diberhentikan sementara. Lebih lanjut, dari keseluruhan jumlah PNS yang ditahan terdapat 41 (empat puluh satu) orang PNS atau 75 % (tujuh puluh lima persen) yang belum ada pemberian sanksi administrasinya, meskipun dalam hal penjatuhan sanksi ini masih ada sebagian kecil yang dalam

proses persidangan, tetapi sebagian besar sudah selesai menjalani proses persidangan, bahkan tidak sedikit PNS yang sudah selesai menjalani vonis dan sudah keluar dari penjara.

Berdasarkan hal tersebut, dari persentase yang meskipun kecil, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sisi penegakan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PNS belum dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta. Seperti adanya PNS yang sudah ditahan oleh pihak yang berwajib tetapi tidak dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri atau PNS yang sudah selesai menjalani vonis tetapi belum ada sanksi hukuman administrasi yang diberikan, hal ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan peraturan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana. Demikian pula halnya dengan adanya PNS yang ditahan tersebut, sesuai data terdapat 54 (lima puluh empat) orang PNS tetapi yang diberhentikan sementara hanya 30 (tiga puluh orang) sementara 24 (dua puluh empat) orang PNS lainnya belum/tidak diberhentikan sementara, hal ini tentu berakibat pada ada perlakuan yang berbeda untuk bentuk pelanggaran yang sama. Padahal menurut asasnya yaitu asas kesamaan dalam mengambil keputusan seharusnya terhadap kasus-kasus yang faktanya sama diambil tindakan yang sama pula, dalam hal ini sama-sama ditahan oleh pihak yang berwajib.

B. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta

1. Surat penahanan dan surat putusan sebagai dasar penindakan

Ketika surat penahanan tidak didapatkan oleh pejabat Pembina kepegawaian, sementara hal tersebut harus menjadi dasar

dikeluarkannya surat keputusan tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri kepada PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana, maka tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian surat penahanan dari pihak yang berwajib kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS yang disangka tersebut bertugas. Ketentuan yang ada hanya mengatur pemberian surat penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya, sementara keluarga tidak mau memberikan dan demikian pula surat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu pemberhentian sementara dan pemberian gaji selama masa pemberhentian

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara, sedangkan sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dinyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 sekaligus mengatur tentang pemberian gaji 75% (tujuh puluh lima persen) atau

50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir selama PNS dimaksud diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, terdapat perbedaan terhadap waktu mulai dilakukannya pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap seorang PNS yang diduga telah melakukan tindak pidana dan ditahan oleh pihak yang berwajib, yaitu apakah dilakukan sejak yang bersangkutan ditahan oleh pihak yang berwajib atau dilakukan sejak yang bersangkutan duduk sebagai terdakwa di muka pengadilan (sebagai terdakwa).

3. Waktu penjatuan sanksi administrasi dan pencabutan surat pemberhentian sementara

Pemberian sanksi administrasi terhadap PNS yang terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan setelah PNS tersebut keluar dari penjara atau selesai menjalani hukuman penjara. Setelah PNS tersebut keluar dari penjara, maka yang bersangkutan langsung melaksanakan tugas, dengan status diberhentikan sementara dan mendapatkan gaji 75 %. Persoalannya, kalau yang bersangkutan harus diberhentikan tapi ternyata belum diberhentikan bahkan langsung melaksanakan tugas, apakah hal itu tidak menambah pengeluaran Negara untuk terus membayar gaji yang bersangkutan walaupun hanya 75 %. Akan tetapi seandainya PNS tersebut berdasarkan peraturan yang ada tidak harus diberhentikan, sementara ia sudah selesai menjalani hukuman penjara dan sudah aktif kembali bekerja tetapi statusnya masih diberhentikan sementara maka hanya memperoleh gaji sebesar 75 %. Pemberian gaji ini senantiasa mengikuti masa berlakunya pemberhentian sementara dari jabatan negeri PNS.

4. Pemberian sanksi, berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 atau PP Nomor 30 Tahun 1980

Peraturan mana yang dapat digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana, apakah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sekarang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Upaya yang harus ditempuh dalam penegakan peraturan mengenai tindak pidana PNS sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta

1. Terhadap surat penahanan dan surat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan surat penahanan dan surat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Melakukan pendekatan secara persuasive kepada keluarga untuk berkenan memberikan surat penahanan dari pihak yang berwajib.
- b. Instansi yang bersangkutan atau melalui Sekretaris Daerah selaku Pembina kepegawaian dapat bersurat kepada pejabat dari instansi yang berwenang yang melakukan penahanan terhadap PNS Provinsi DKI Jakarta untuk mendapat salinansurat penahanan dan surat putusan tersebut.
- c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka pembinaan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga apabila terdapat PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana baik

pidana kejahatan umum maupun pidana kejahatan jabatan maka Gubernur selaku pejabat Pembina kepegawaian akan mendapatkan laporan dari pihak yang berwajib tersebut.

- d. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya melibatkan Biro Hukum untuk bertanggung jawab dan berperan serta secara aktif dalam memenuhi kebutuhan kelengkapan administrasi sebagai syarat-syarat yang mendukung terlaksananya penegakan peraturan mengenai tindak pidana PNS.

2. Terhadap waktu pemberhentian sementara dan pemberian potongan gaji selama diberhentikan sementara dari jabatan negeri

Dalam hal terhadap waktu pemberhentian sementara terdapat perbedaan antara kata penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan kata kepentingan peradilan dan yang didakwa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 maka sebagai penyelesaiannya adalah melalui asas hukum yaitu asas *Lex posterior derogat legi priori* artinya peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama dan asas *Lex superior derogate legi inferiori* artinya peraturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu dapat diperbandingkan antara Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, yaitu dari segi waktu maupun dari segi hierarki jelas lebih baru dan lebih tinggi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. Adapun terhadap pemotongan gajinya secara serta merta mengikuti waktu penahanan semmentarnya

3. Terhadap waktu penjatuhan sanksi administrasi dan pencabutan surat keputusan pemberhentian sementara

Terhadap tindak pidana kejahatan yang ancamannya diatas 4 (empat) tahun dan tindak pidana kejahatan jabatan tidak perlu lagi

dilakukan pemeriksaan. Adapun dalam mengambil keputusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini berlaku asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Akan tetapi terhadap tindak pidana kejahatan umum yang ancaman hukumannya dibawah 4 (empat) tahun, oleh karena menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka berlaku ketentuan tentang pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tanpa mengabaikan ancaman hukuman dan putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk pencabutan surat keputusan pemberhentian sementara, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PNS yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

4. Terhadap peraturan yang menjadi dasar, antara PP Nomor 32 Tahun 1979 atau PP Nomor 30 Tahun 1980

Terhadap tindak pidana kejahatan umum yang sanksi hukumannya diatas 4 (empat) tahun dan tindak pidana kejahatan jabatan maka penjatuhan sanksinya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan jenis sanksi pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat. Walaupun berdasarkan uraian tidak mutlak juga, karena dalam ketentuan-ketentuan yang ada ternyata tidak menutup kemungkinan pemberian sanksi pemberhentian terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Menurut penulis, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana yang tidak boleh keluar apalagi menyimpang dari Undang-undang yang mengaturnya. Untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatas 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diatur secara terpisah antara tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih dengan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, dimana keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan hal tersebut, meskipun sanksi yang diberikan diatur keduanya (yaitu mengenai pemberhentian) baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS, namun Undang-undang tersebut memisahkan antara tindak pidana pada huruf a dan pelanggaran disiplin pada huruf b, yang artinya tindak pidana kejahatan seharusnya menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, karena diatur secara eksplisit didalamnya, dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Pengertian pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Artinya pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai kewajiban dan larangan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sementara dalam ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Adapun terhadap tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan secara eksplisit bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya sangat jelas berkaitan mengatur tentang terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan, sedangkan jika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 akan menjadi bias karena tidak ada ketentuan yang menyatakan atau mengatur secara langsung tentang terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh PNS. Kecuali dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukumnya. Terhadap ketentuan ini sesuai uraian diatas berlaku untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta sesuai data yang ada belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 maupun peraturan yang ada dibawahnya. Hal ini berakibat pada tidak terlaksananya asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan.
2. Kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan peraturan mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
 - a. Belum ada ketentuan yang mengatur perihal didapatkannya surat penahanan dan surat putusan dari pihak yang berwajib kepada pejabat Pembina kepegawaian sehubungan telah ditahannya dan divonisnya seorang PNS karena diduga/telah melakukan tindak pidana.
 - b. Akibat tidak didapatkannya surat penahanan dari pihak yang berwajib ditambah adanya interpretasi yang berbeda terhadap waktu pemberhentian sementara antara sejak dilakukan penahanan atau sejak didakwa (di Pengadilan) menyebabkan terhambatnya proses pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap PNS yang diduga telah melakukan tindak pidana. Adapun terhadap pemberian gaji selama diberhentikan sementara, tidak ada tolok ukur yang jelas perihal dugaan kuat tidaknya telah dilakukan tindak pidana sehingga terjadi interpretasi dari pejabat Pembina kepegawaian untuk memberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) atau 50 % (lima puluh persen).

- c. PNS yang diduga/telah melakukan tindak pidana sering kali baru melaporkan proses hukumnya setelah keluar/bebas dari tahanan penjara sehingga tidak diketahui kapan vonis inkrahnya. Demikian pula pejabat Pembina kepegawaian tidak dapat memonitor proses hukum PNS yang sedang berlangsung dalam persidangan.
 - d. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana PNS terjadi perbedaan dalam peraturan pelaksanaannya khususnya terhadap tindak pidana kejahatan jabatan apakah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
3. Upaya yang sudah dilakukan agar dapat ditegakkan peraturan mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi tempat PNS yang ditahan untuk segera mendapatkan surat penahanan maupun surat putusan.
 - b. Waktu pemberhentian sementara dari jabatan negeri dilakukan mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu pada saat ditahan oleh pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan PNS yang bersangkutan sudah tidak melaksanakan tugas.
 - c. Sudah dilakukan rapat koordinasi antar instansi yang terkait untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan sanksi yang harus diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana.
 - d. Badan Kepegawaian Daerah sudah membuat perbal penjatuhan sanksi administrasi terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu berupa pemberhentian dari PNS.

B. Saran

1. Terhadap surat penahanan dan surat putusan dapat dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka pembinaan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga apabila terdapat PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana baik pidana kejahatan umum maupun kejahatan jabatan maka Gubernur selaku pejabat Pembina kepegawaian akan mendapatkan laporan atau salinan surat penahanan dari pihak yang berwajib tersebut. Secara internal dibuat *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk melibatkan Biro Hukum dan instansi-instansi lain agar bertanggung jawab dan berperan serta secara aktif dalam memenuhi kebutuhan kelengkapan administrasi sebagai syarat-syarat yang mendukung terlaksananya penegakan peraturan mengenai tindak pidana PNS sehingga tidak terjadi persoalan dalam proses penyelesaiannya. Dilihat dari segi aturan perlu adanya ketentuan yang mengatur perihal upaya mendapatkan surat penahanan dan surat putusan terhadap PNS yang diduga/telah melakukan tindak pidana, oleh karena hal ini menyangkut PNS maka sebaiknya hal tersebut dijadikan materi perubahan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 atau Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 sehingga menjadi jelas kapan seorang PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri diberikan gaji 75 % (tujuh puluh lima persen) dan kapan diberikan gaji 50 % (lima puluh persen).
3. Penjatuhan sanksi administrasi harus segera dilakukan pada saat ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada saat itu juga secara bersamaan dilakukan pencabutan surat keputusan

pemberhentian sementara dari jabatan negeri, kecuali terhadap tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya dibawah 4 (empat) tahun pemberian sanksinya setelah PNS tersebut selesai menjalani hukuman penjara. Pejabat Pembina kepegawaian harus secara proaktif melakukan upaya-upaya untuk mendapat surat penahanan dan surat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta.

4. Harus ada keberanian dan ketegasan dari pejabat Pembina kepegawaian di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang terhadap terjadinya tindak pidana oleh PNS. Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan atau keluar dari Undang-undang yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

Azhary, M Tahir, 2004, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Bapeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009, *Buku Saku Jakarta 2009*.

Samudra, Syahda. GL, 2000, *Menimbang Otonomi VS Federal*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

HR. Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di*

- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muslimin, Amran, 1986, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Marbun, B.N, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priatno. Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1992, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soehino, 2004, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka otonomi Daerah*, Mandar maju, Bandung.

_____, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sulistiyani AT (Editor), *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, 2004, Gava Media, Yogyakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Utrecht, E, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tirta Mas, Suabaya.

Usfa, A Fuad, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 26.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3344.

Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah.